

RENCANA AKSI DAN CAPAIAN POKJA PELAYANAN PUBLIK

KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2018

No.	PROGRAM/ TARGET	CAPAIAN
1	Implementasi Pelayanan Satu Atap Kementerian Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan pelayan terpadu satu Pintu (PTSP) Kominfo dan telah disusun Standar Operating prosedur pelaksanaannya.
2	<p>Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>Revisi regulasi tetang standar pelayanan : Draft Revisi KM No.555 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kominfo</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koodinasi dengan Kementerian PAN dan RB b. Penyampaian Revisi ke Menteri Kominfo c. Penetapan Keputusan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah ditetapkan Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Infomatika - revisi KM 555 tahun 2013 masih dalam proses pembahasan dengan Menpan dan RB Asdep Layanan Publik)
3	<p>Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Pengusulan Inovasi b. Rapat Pembahasan Proposal di Kementerian PAN dan RB c. Pengajuan Proposal ke KemenPAN dan RB 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kominfo telah mengajukan 2 program inovasi layanan publik yaitu : Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Pengujian dan Program Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Hebat Handal Berbasis Teknologi Informasi (SIPPP DIHATI) - Usulan program yang dilombakan tersebut telah melalui persentasi dan wawancara dengan Tim Pansel inovasi Layanan Publik (Sinovik). - Program Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Hebat Handal Berbasis Teknologi Informasi (SIPPP DIHATI) berhasil masuk ke kategori Top 99 inovasi pelayanan publik KemenPAN dan RB and akan menerima penghargaan di Surabaya tanggal 29 Agustus 2018 dan saat ini sedang diikutsertakan dalam seleksi Top 40. - Dalam rangka mendorong inovasi dan tatakelola perkantoran telah dilaksanakan Program Inovation of Frequency and Standardisation Festival (IFASFEST) pada bulan Juli 2018.

4	<p>Pengelolaan Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi persiapan pengaduan 159 b. Uji Coba c. Implementasi d. Integrasi dengan LAPOR 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan Layanan Publik di Kementerian Kominfo masih proses integrasi ke nomor 159, yang selama ini adalah 159 dan nomor 30003100. - Kementerian Kominfo termasuk 3 peringkat besar kementerian yang melaksanakan LAPOR di tahun 2018
5	<p>Implementasi SE Sekjen terkait sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan SOP b. Sosialisasi c. Monev 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Sekjen tentang reward and punishment masih dalam pembahasan dan masih berupa draf. - Untuk pemberian reward sudah dilaksanakan untuk para petugas loket setiap bulannya pemberian piagam. Kemudian untuk penghargaan kepada PNS yang berprestasi, diberikan training dalam dan luar negeri.
6	<p>Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan di Kemkominfo</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Survey b. Publikasi hasil survey 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kominfo khususnya di layanan publik perizinan penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, serta Perizinan Frekuensi (ISR), Sertifikasi operator radio dan pengujian serta sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dilaksanakan per-tahunan. - Hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks integritas pelayanan public (IIPP) telah diupload di Web Kominfo (www.kominfo.go.id)
7	<p>Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Publik :</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan Kominfo dalam Penerapan OSS : <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Publik di lingkungan Ditjen PPI saat ini untuk perizinan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sudah terkoneksi dengan sistem OSS nasional dan alur siklus (SOP) sudah dapat diimplementasikan hingga izin penyelenggaraan terbit (Uji coba). Saat ini dasar hukum pelaksanaannya masih dalam pembahasan. - Melaksanakan proses menghubungkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) dengan system OSS. b. Pengembangan teknologi untuk sertifikasi Operator Radio :

		<ul style="list-style-type: none"> - Ditjen SDPPI menerapkan teknologi Computer Assisted Test (CAT) untuk ujian sertifikasi Operator Radio, Pembayaran Host to Host untuk sertifikasi operator radio. c. Penerapan sistem online kunjungan : <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen IKP (Muspen) membuat website mendaftarkan kunjungan secara online . d. Monev Proses Sertifikasi alat perangkat telekomunikasi melalui aplikasi diPonsel
8	Bimtek Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan sosialisasi internal dua bulan sekali kepada PNS dan Non PNS, melaksanakan kegiatan Capacity Building, melaksanakan Pelatihan Service exelence (inhouse training). (foto, rispat, laporan kegiatan) - Telah melaksanakan pelatihan terhadap petugas PTSP tentang jenis layanan publik yang dilaksanakan. - (Muspen) rutin mengirim SDM untuk mengikuti sertifikasi pemandu museum oleh Kemenpar (bukti dukungnya) setiap tahunnya.